

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF) sebagai komitmen politik negara-negara ASEAN ditujukan sebagai wahana untuk membahas isu maritim yang berkaitan dengan kepentingan bersama negara anggota. AMF berada dalam payung ASEAN Security Community dan diharapkan dapat berkontribusi dalam pembentukan masyarakat ASEAN yang lebih terpadu. Signifikansi pembentukan AMF semakin menguat karena keamanan maritim dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam gagasan ASEAN Security Community.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam menanggulangi perompakan di Selat Malaka pada periode 2022-2024 dengan menggunakan kerangka teori transnasionalisme sebagai grand theory dan konsep security community sebagai teori pelengkap. Selat Malaka dipilih sebagai fokus penelitian karena posisinya sebagai salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia yang secara konsisten menjadi episentrum kejahatan maritim di kawasan Asia, khususnya dalam bentuk armed robbery against ships (ARAS).

Berdasarkan data ReCAAP Information Sharing Centre, periode 2022-2024 menunjukkan bahwa tingkat perompakan di Selat Malaka tetap tinggi dan cenderung fluktuatif, bahkan mengalami peningkatan baik dari segi jumlah insiden maupun tingkat kekerasan. Lebih dari separuh insiden perompakan di Asia tercatat terjadi di kawasan Selat Malaka dan Singapura, dengan karakteristik insiden yang semakin berisiko terhadap keselamatan awak kapal. Temuan empiris ini menegaskan bahwa perompakan di Selat Malaka merupakan ancaman keamanan maritim yang bersifat transnasional dan tidak dapat dipahami sebagai persoalan domestik semata.

Dalam kerangka teori transnasionalisme, perompakan di Selat Malaka mencerminkan bentuk ancaman lintas batas negara yang melibatkan aktor, ruang, dan kepentingan yang melampaui yurisdiksi nasional. Kejahatan maritim ini terjadi dalam ruang laut yang menghubungkan berbagai negara dan dipengaruhi oleh intensitas arus perdagangan global, mobilitas pelaku lintas negara, serta keterbatasan pengawasan di perairan internasional. Oleh karena itu, respons terhadap perompakan tidak dapat bergantung sepenuhnya pada pendekatan keamanan tradisional yang bersifat negara-sentris dan operasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN Maritime Forum tidak memiliki mandat operasional maupun kewenangan taktis dalam penanggulangan perompakan di Selat Malaka, namun demikian, dalam perspektif transnasionalisme AMF justru berfungsi sebagai arena transnasional yang memfasilitasi interaksi lintas negara melalui dialog, pertukaran pandangan, dan pembentukan kesepahaman bersama mengenai isu-isu maritim. Dalam konteks ini, peran AMF terletak pada domain kekuasaan non-material, khususnya dalam pembentukan wacana, norma, dan persepsi bersama antarnegara ASEAN.

Melalui mekanisme diskusi reguler, AMF berkontribusi dalam membangun shared understanding mengenai isu keamanan maritim sebagai kepentingan bersama kawasan. Meskipun perompakan di Selat Malaka tidak selalu menjadi fokus utama dalam agenda tematis AMF, keberadaan forum ini memungkinkan negara-negara ASEAN untuk menyampaikan pandangan, kekhawatiran, serta kebijakan nasional terkait isu maritim dalam suasana yang relatif terbuka dan kooperatif. Proses ini penting dalam mencegah mispersepsi dan ketegangan politik di kawasan perairan strategis.

Dalam kerangka transnasionalisme, AMF dapat dipahami sebagai bagian dari transnational policy network yang berperan menciptakan policy environment yang kondusif bagi kerjasama keamanan maritim. AMF tidak bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai policy enabler yang membantu menyelaraskan kepentingan, memperkuat koordinasi normatif, dan membangun legitimasi politik bagi berbagai mekanisme kerja sama maritim yang bersifat teknis dan operasional.

Konsep security community melengkapi analisis ini dengan menjelaskan bagaimana interaksi yang berulang melalui forum seperti AMF berkontribusi pada pembentukan kepercayaan dan identitas kolektif antarnegara ASEAN. Dalam perspektif ini, keamanan kawasan tidak dibangun melalui dominasi kekuatan militer, melainkan melalui proses sosial yang menekankan dialog, transparansi, dan penyelesaian konflik secara damai. AMF berperan sebagai salah satu wahana institusional yang mendukung proses tersebut di ranah maritim.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa AMF berfungsi sebagai forum confidence building measures dan peningkatan transparansi kebijakan antarnegara. Melalui pertukaran pandangan dan diskusi kebijakan, AMF membantu mengurangi potensi kecurigaan dan salah persepsi, khususnya di kawasan perairan yang memiliki sensitivitas tinggi seperti Selat Malaka. Dalam konteks security community, fungsi ini menjadi prasyarat penting bagi stabilitas kawasan jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa ASEAN Maritime Forum sebagai forum kerjasama keamanan maritim di Selat Malaka pada periode 2022-2024 memiliki peran normative dan interaktif yang bersifat tidak langsung dan non-operasional. AMF tidak berperan sebagai aktor penindak kejahatan maritim, melainkan sebagai forum diplomatik transnasional yang membentuk kerangka normatif, wacana kebijakan, dan kesepahaman bersama antar negara ASEAN.

Dalam kerangka transnasionalisme dan security community, peran normatif dan interaktif tersebut tetap relevan karena keamanan maritim kawasan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas patroli atau kapasitas militer, tetapi juga oleh kuatnya arsitektur kerja sama regional yang menopangnya. AMF membantu menciptakan lingkungan strategis yang stabil, kooperatif, dan berbasis kepercayaan, yang pada gilirannya memungkinkan mekanisme operasional lain bekerja secara lebih efektif.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa AMF harus dipahami sebagai *preventive diplomacy* yang berkontribusi pada tata kelola keamanan maritim regional melalui pendekatan transnasional dan pembentukan security community.

Dalam konteks Selat Malaka, peran normatif dan interaktif AMF menjadi pondasi penting bagi upaya kolektif ASEAN dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim kawasan secara berkelanjutan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, ASEAN Maritime Forum (AMF) perlu semakin diarahkan sebagai forum diplomasi maritim yang secara konsisten mengarusutamakan isu kemaritiman terutama pada keamanan non-tradisional, khususnya kejahatan maritim seperti perompakan sebagai agenda strategis kawasan. Meskipun AMF tidak berfungsi sebagai mekanisme operasional, penguatan perannya sebagai ruang pembentukan norma, penyalarsan persepsi ancaman, dan pertukaran pandangan kebijakan menjadi sangat penting dalam membangun rasa solidaritas keamanan (*we feeling*) antarnegara ASEAN. Dalam konteks Selat Malaka, AMF dapat mendorong terbentuknya kesamaan cara pandang mengenai urgensi keamanan jalur pelayaran internasional sebagai kepentingan bersama, sehingga negara-negara anggota tidak memandang keamanan Selat Malaka semata sebagai tanggung jawab negara pantai, tetapi sebagai bagian dari stabilitas maritim regional.

5.2.2 Saran Akademis

Secara akademis, penelitian selanjutnya dapat memperluas pendekatan teoritis dengan mengkombinasikan teori *security community* dengan teori keamanan non-tradisional atau *maritime security governance* untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kerja sama keamanan di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, studi komparatif antara peran AMF dan forum maritim regional di kawasan lain juga penting dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas diplomasi maritim ASEAN dalam membangun tatanan keamanan regional yang stabil dan berkelanjutan.